



## PEMETAAN STATISTIKA PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH BERDASARKAN KARAKTERISTIK DAERAH

**Maria Mau Sari dan Uka Wikarya**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: marie.sari@yahoo.com, uka.wikarya@outlook.com

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima 25 Januari 2021

Diterima dalam bentuk

revisi 08 Maret 2021

Diterima dalam bentuk

revisi 18 Maret 2021

#### Keywords:

*DID; incentive; local government performance; logistic regression; reward.*

#### Kata kunci:

*DID; insentif; kinerja pemerintah daerah; logit.*

**Abstract:** *The Regional Incentive Fund (DID) policy in Indonesia began in 2011 with the aim of giving awards to local governments for their performance. Considering the development of DID being prioritized by the central government, there needs to be an evaluation in its allocation. This research will look at how the policy evaluation is seen from the appropriateness of the allocation of DID granting and to know what factors are dominant in giving DID to local governments. The method used is logistic regression to see whether the area meets the criteria or not, if the area meets the criteria, it is entitled to receive DID. Furthermore, the results of observational probability values will be compared with the status of DID recipients from the Ministry of Finance data for the period 2012 - 2020. The results show that there is a discrepancy in the allocation of DID, where regions that meet the assessment criteria should be entitled to receive DID, but in reality do not accept DID and vice versa.*

**Abstrak:** Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) di Indonesia dimulai sejak tahun 2011 dengan tujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya. Mengingat perkembangan DID menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat maka perlu adanya evaluasi dalam pengalokasiannya. Penelitian ini akan melihat bagaimana evaluasi kebijakan tersebut dilihat dari kesesuaian alokasi pemberian DID serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan dalam pemberian DID kepada pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah regresi logistik untuk melihat apakah daerah tersebut memenuhi kriteria atau tidak, apabila daerah tersebut memenuhi kriteria maka berhak untuk menerima DID. Selanjutnya, hasil nilai probabilitas observasi akan dibandingkan dengan status penerima DID dari data Kemenkeu periode waktu 2012 – 2020. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam pengalokasian DID, dimana daerah yang memenuhi kriteria penilaian harusnya berhak menerima DID, tetapi kenyataannya tidak menerima DID dan sebaliknya.

---

**Corresponden author: Maria Mau Sari**

Email: marie.sari@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

## Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai diberlakukan sejak tahun 2001 melalui terbitnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Indonesia, 1999) tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang tersebut merupakan awal reformasi di bidang birokrasi dan ekonomi karena pemerintah daerah diberikan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan umum bagi masyarakat, mengatur rumah tangganya sendiri serta menjalankan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan daerahnya.

Wujud dari desentralisasi fiskal ini adalah adanya dana transfer ke daerah. Dalam Teori Transfer (Harvey & Gayer, 2013) jenis transfer dibagi menjadi dua, yaitu Transfer Bersyarat (*Conditional Grants*) dan Transfer Tidak Bersyarat (*Unconditional Grants*). Dana transfer ke daerah merupakan cermin dari peran pemerintah pusat yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Skema dana transfer ke daerah ini mengalami perubahan menuju penyederhanaan.

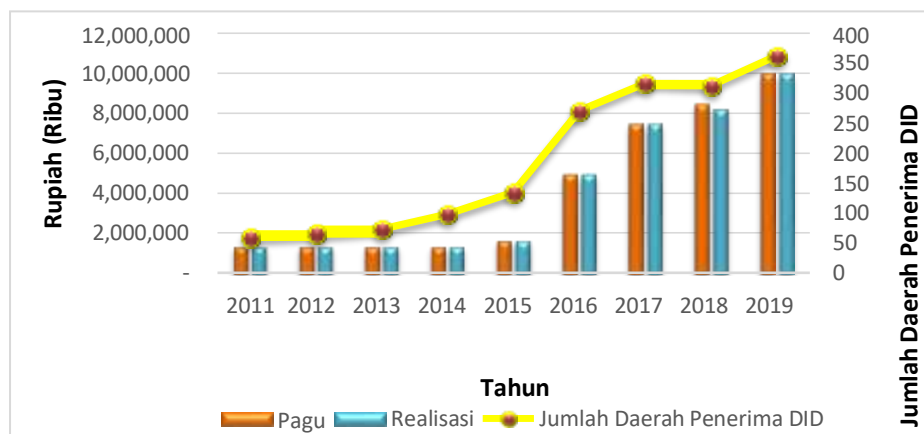
Sejak tahun 2011, Pemerintah menciptakan skema pendanaan berbasis insentif berbentuk Dana Insentif Daerah (DID), yang masuk dalam alokasi dana transfer ke daerah kategori Dana Non Perimbangan. Tujuan DID adalah (1) untuk mendorong tata kelola keuangan daerah, (2) mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum pemerintahan, (3) mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan (4) mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Cahyadi, 2016)

Pengertian insentif menurut (Cassio, 2013) yaitu penghargaan yang diberikan kepada individu atas perbedaan dalam pencapaian hasil kerja. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) insentif digunakan dalam rangka mendorong karyawan agar memperbaiki kualitas dan kuantitas kerjanya. Pemberian insentif adalah salah satu usaha perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawannya (Ruzikna & Fitriadi, 2015) Pengertian insentif menurut (Ranupandojo & Husnan, 1984) yaitu pemberian upah dengan imbalan yang berbeda karena prestasi yang berbeda.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki dengan meminimalisir kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Nordiawan & Hertianti, 2006). Keberadaan DID merupakan salah satu faktor yang menjadi pendorong suatu daerah dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik dan sesuai karena belanja modal merupakan salah satu indikator bagi pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan publik.

Dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat, kinerja pemerintah tidak lepas aktifitas ekonomi. Aktifitas-aktifitas ekonomi pemerintah tersebut merupakan keuangan

publik. Menurut (Harvey & Gayer, 2013), keuangan publik adalah langkah pemerintah dalam menentukan distribusi, alokasi sumber pendapatan serta aktivitas pengeluaran pemerintah.



**Gambar 1. Perkembangan Pagu Realisasi dan Daerah Penerima Dana Insentif Daerah Tahun 2011 - 2019**

DID pertama kali dikururkan pada tahun 2011 dengan alokasi sebesar 1,38 triliun rupiah sampai tahun 2014. Sejak tahun 2015, alokasinya meningkat setiap tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pelayan publik di daerahnya guna mendapatnya dana insentif tersebut. Pada tahun 2016 peningkatan pagu alokasi terlihat semakin signifikan yaitu menjadi Rp 5 triliun. Lebih lanjut, pertumbuhan pagu DID tersebut juga sejalan dengan peningkatan jumlah daerah penerima DID. Sejak tahun 2011 hingga 2019, jumlah daerah penerima DID terus meningkat dari 60 menjadi 363 daerah. Kenaikan jumlah daerah penerima DID secara signifikan terjadi pada tahun 2016. Dimana tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, jumlah daerah penerima DID adalah 135 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 271 daerah. Hal tersebut terjadi seiring dengan kenaikan jumlah pagu DID pada tahun 2016.

Dalam perkembangannya, kriteria penilaian untuk memperoleh DID mengalami perubahan waktu demi waktu. Sejak awal, terdapat dua kriteria dalam pengalokasian DID, yaitu kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan DID, terdiri atas Opini BPK atas LKPD WTP dan Penetapan Perda APBD tepat waktu, sedangkan pada tahun 2018, Kriteria Utama mengalami penambahan indikator yaitu E-Government dan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun untuk Kriteria Kinerja terdiri dari Kinerja Pengelolaan Keuangan dinilai dari kemampuan daerah mempertahankan opini WTP dari BPK, kenaikan PAD di atas rata-rata nasional, realisasi belanja atas pagu belanja, realisasi belanja modal atas realisasi belanja; Kinerja Pelayanan Pemerintahan Umum dinilai melalui SAKIP, inovasi pelayanan publik, kemudahan investasi; Kinerja Pelayanan Dasar Publik bidang Pendidikan, dinilai melalui APM SMP, HLS dan RLS; Kinerja Pelayanan Dasar Publik bidang Kesehatan dinilai melalui % Balita Sudah Imunisasi, % Balita Stunting; Kinerja pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dinilai melalui rumah tangga dengan akses air minum layak, Rumah tangga dengan sanitasi yang layak, Jalan kondisi mantap; Kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dinilai melalui pertumbuhan ekonomi dan % penurunan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 belum ada evaluasi terkait dengan kesesuaian pemberian DID pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga, kemungkinan apakah terjadinya ketidaksesuaian alokasi masih menjadi sesuatu hal yang perlu diteliti lebih mendalam. Hal ini dikarenakan, anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk DID, apabila tidak dialokasikan dengan tepat, maka akan merugikan provinsi, kabupaten dan kota, yang memiliki potensi atau lebih berhak untuk memperoleh DID.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan DID dilihat dari kesesuaian alokasi pemberian DID, mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian alokasi serta untuk mengetahui faktor yang mendeterminasi pemberian DID kepada pemerintah daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode analisis data panel, yang mengambil data tahun 2010 sampai 2018 di 501 daerah dengan dengan data lag 2 tahun, dimana data penerima DID sebagai variabel dependen dari tahun 2012 sampai 2020. Unit yang diteliti dalam penelitian ini adalah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sebanyak 501 daerah dari total 542 daerah, dengan rincian 468 kabupaten kota dari 508 kabupaten kota dan 33 provinsi dari 34 provinsi.

Penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan regresi logistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian sehingga akan diketahui indikasi-indikasi yang dapat membantu proses analisis. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik dikarenakan model variabel dependen adalah variabel kategori, dengan nilai 1 untuk daerah yang menerima DID dan nilai 0 untuk daerah yang tidak menerima DID.

#### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu dummy penerimaan DID. Penerimaan DID sebagai variabel dependen didapatkan dari data Kementerian Keuangan selama rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2020 untuk 501 daerah kabupaten/kota dan provinsi. Yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Daerah yang tidak menerima DID) dan *dummy* 1 (Daerah yang menerima DID).

#### **2. Variabel Independen**

Pemberian DID ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yang dalam penelitian ini akan dijadikan variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, di bagi menjadi beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Kriteria Kinerja Utama, ada 2 (dua) variabel data yang digunakan, yaitu:
  - a. Data Opini BPK atas LKPD, berupa ordinal kategori dengan nilai 1 sampai dengan 4, yakni: 1 (TMP: Tidak Menyatakan Pendapat); 2 (TW: Tidak Wajar); 3 (WDP: Wajar Dengan Pengecualian); 4 (WTP: Wajar Tanpa Pengecualian).  
(Indrarti, 2011) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara penilaian opini audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah, yaitu semakin tinggi penilaian opini BPK maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.
  - b. Data Ketepatan Waktu dalam Menetapkan Perda tentang APBD, yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Tidak Tepat Waktu) dan *dummy* 1 (Tepat Waktu).

- 2) Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan, ada 2 (dua) variabel data yang digunakan, yaitu:
  - a. Data Perubahan Opini BPK (Kenaikan/Tetap Mempertahankan/Penurunan Opini dari tahun sebelumnya), berupa ordinal kategori nilai 0 sampai dengan 4, yakni: 0 (Penurunan Opini/tetap di level Opini TWP dari tahun sebelumnya); 1 (Tetap di Opini yang sama dari tahun sebelumnya); 2 (Kenaikan Opini 1 Level dari tahun sebelumnya); 3 (Kenaikan Opini 2 Level dari tahun sebelumnya); 4 (Kenaikan Opini 3 Level/mempertahankan Level Opini WTP dari tahun sebelumnya).  
Dalam penelitian (Virgasari, 2009) ditemukan bahwa hasil audit BPK akan memberikan pengaruh bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang lebih maksimal lagi untuk menciptakan kinerja yang lebih baik kedepannya.
  - b. Data Kenaikan PAD, yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Di bawah rata-rata nasional) dan *dummy* 1 (Di atas rata-rata nasional).  
Menurut (Adi, 2016) jumlah PAD yang meningkat harusnya diiringi dengan kualitas pelayanan publik yang juga meningkat. Semakin tinggi PAD menunjukkan tingginya kemandirian suatu daerah, hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari suatu daerah (Andriyani, 2013).
- 3) Kriteria Kinerja Pendidikan, ada 2 (dua) variabel data yang digunakan, yaitu:
  - a. Data Angka Partisipasi Murni SMP, yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Di bawah rata-rata nasional) dan *dummy* 1 (Di atas rata-rata nasional).
  - b. Data Angka Harapan Lama Sekolah, yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Di bawah rata-rata nasional) dan *dummy* 1 (Di atas rata-rata nasional).  
Berdasarkan penelitian (Handayani et al., 2016) menyimpulkan bahwa HLS berpengaruh positif signifikan terhadap perekonomian suatu daerah.
- 4) Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, ada 2 (dua) variabel data yang digunakan, yaitu:
  - a. Data Persentase Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Di bawah laju PDB) dan *dummy* 1 (Di atas laju PDB).  
Peningkatan PDRB menunjukkan kapabilitas masyarakat untuk membayar pajak yang merupakan sumber PAD, dimana PAD menunjukkan kemandirian daerah. Artinya, tingginya PDRB akan menciptakan kinerja ekonomi daerah yang baik pula (Andriyani, 2013).
  - b. Data Perubahan Tingkat Kemiskinan, yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Di bawah rata-rata perubahan tingkat kemiskinan nasional) dan *dummy* 1 (Di atas rata-rata perubahan tingkat kemiskinan nasional).  
Variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah (Chaniago & Rusdi, n.d.).
- 5) Kriteria Kinerja Kesehatan, ada 1 (satu) variabel data yang digunakan, yaitu:
  - a. Data Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), yang dikategorikan dengan *dummy* 0 (Di bawah rata-rata nasional) dan *dummy* 1 (Di atas rata-rata nasional).  
Intervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerima imunisasi merupakan salah satu upaya dalam menciptakan peningkatan status kesehatan di Papua Barat (Ramadhani, 2019).

Rangkuman dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Variabel Penelitian**

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber	Expected Sign
<b>Variabel Dependen</b>				
Pagu DID		Dummy Kategori (0-1) 0 (Tidak menerima DID) 1 (Menerima DID)	Data Kemenkeu	
<b>Variabel Independen</b>				
Opini BPK	<i>opini_bpk</i>	Ordinal Kategori (1-4) 1 (TMP: Tidak Menyatakan Pendapat) 2 (TW: Tidak Wajar) 3 (WDP: Wajar Dengan Pengecualian) 4 (WTP: Wajar Tanpa Pengecualian)	Data BPK	(+)
Ketepatan Waktu Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD	<i>penetapan_perda</i>	Dummy Kategori (0-1) 0 (tidak tepat waktu) 1 (tepat waktu)	Data Kemenkeu	(+)
Perubahan/ Kenaikan Opini BPK	<i>perubahan_opini</i>	Ordinal Kategori (0-4) 0 (Penurunan opini/tetap di level opini TWP dari tahun sebelumnya) 1 (Tetap di opini yang sama dari tahun sebelumnya) 2 (Kenaikan opini 1 level dari tahun sebelumnya) 3 (Kenaikan opini 2 level dari tahun sebelumnya) 4 (Kenaikan opini 3 level/ mempertahankan level opini WTP dari tahun sebelumnya)	Data BPK	(+)
Kenaikan PAD	<i>kenaikan_pad</i>	Dummy Kategori (0-1) 0 (di bawah rata-rata nasional) 1 (di atas rata-rata nasional)	Data Kemenkeu	(+)
Angka Partisipasi Murni SMP	<i>apm_smp</i>	Dummy Kategori (0-1) 0 (di bawah rata-rata nasional) 1 (di atas rata-rata nasional)	Data Kemendikbud	(+)
Harapan Lama Sekolah	<i>hls</i>	Dummy Kategori (0-1) 0 (di bawah rata-rata nasional) 1 (di atas rata-rata nasional)	Data Kemendikbud	(+)
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	<i>laju_pdrb</i>	Dummy Kategori (0-1) 0 (di bawah laju PDB) 1 (di atas laju PDB)	Data BPS	(+)
Perubahan Tingkat Kemiskinan	<i>perubahan_kemiskinan</i>	Dummy Kategori (0-1) 0 (di bawah rata-rata perubahan tingkat kemiskinan nasional)	Data BPS	(+)

		1 (di atas rata-rata perubahan tingkat kemiskinan nasional)		
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	<i>idl</i>	<i>Dummy</i> Kategori (0-1) 0 (di bawah rata-rata nasional) 1 (di atas rata-rata nasional)	Data Kemenkes	(+)

Spesifikasi model pada penelitian ini menjelaskan bahwa variabel DID yang dialokasikan untuk entitas pemerintah daerah *i* pada periode *t*, adalah fungsi dari *dummy* kategori opini BPK, *dummy* ketepatan waktu penetapan perda APBD, *dummy* perubahan opini BPK, *dummy* jumlah kenaikan PAD, *dummy* angka partisipasi murni SMP, *dummy* harapan lama sekolah, *dummy* laju PDRB, *dummy* perubahan tingkat kemiskinan, *dummy* persentase (%) imunisasi dasar lengkap. Model yang digunakan dalam analisis logit dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 L_i &= \ln \left( \frac{p_i}{1 - p_i} \right) \\
 &= \beta_0 + \beta_1 \text{opini\_bpk}_{it} + \beta_2 \text{penetapan\_perda}_{it} + \beta_3 \text{perubahan\_opini}_{it} \\
 &\quad + \beta_4 \text{kenaikan\_pad}_{it} + \beta_5 \text{apm\_smp}_{it} + \beta_6 \text{hls}_{it} + \beta_7 \text{laju\_pdrb}_{it} \\
 &\quad + \beta_8 \text{perubahan\_kemiskinan}_{it} + \beta_9 \text{idl}_{it} + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

Penelitian ini, awalnya penulis berencana akan memasukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kriteria kesejahteraan dan variabel Angka Harapan hidup (AHH) untuk mengukur kriteria kinerja kesehatan. Akan tetapi pada perjalanannya kedua variabel tersebut tidak jadi dimasukkan. Untuk variabel IPM tidak dimasukkan karena memiliki hubungan kausalitas dengan variabel HLS. Dimana variabel IPM, komponen di dalamnya adalah HLS dan AHH. Selanjutnya, untuk variabel AHH tidak dimasukkan dalam model karena nilai AHH dirasa tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam waktu 1 atau 2 tahun serta AHH juga memiliki rantai panjang dalam proses pengaruhnya. Sehingga untuk kriteria kinerja kesehatan, penulis hanya menggunakan variabel imunisasi dasar lengkap (IDL).

Model penelitian di atas digunakan untuk melihat probabilitas suatu daerah yang menunjukkan apakah memenuhi kriteria penilaian sehingga berhak menerima DID atau tidak. Melalui model di atas, jika probabilitas prediksi model suatu daerah menghasilkan nilai probabilitas 0,5 ke atas maka daerah tersebut memenuhi kriteria penilaian, sehingga berhak untuk menerima DID. Sebaliknya, jika probabilitas prediksi model suatu daerah menghasilkan nilai probabilitas di bawah 0,5 diasumsikan daerah tersebut tidak memenuhi kriteria penilaian sehingga tidak berhak untuk menerima DID.

Setelah mendapatkan nilai probabilitas pada masing-masing observasi, dilakukan pengelompokan kesesuaian. Aturan pengelompokan adalah jika hasil nilai probabilitas di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas menjadi 1 (memenuhi kriteria sehingga berhak menerima DID). Sedangkan bila nilai probabilitas di bawah 0,5 maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 (tidak memenuhi kriteria sehingga tidak berhak menerima DID). Tahap selanjutnya yaitu pengecekan kesesuaian alokasi DID antara model statistik disandingkan dengan data status menerima/tidakny suatu daerah DID dari data Kementerian Keuangan.

Hasil nilai 0 1 dari model disandingkan dengan kode *dummy* 0 1 dari data Kemenkeu (0 = status daerah tidak mendapatkan DID, 1 = status daerah mendapatkan DID). Apabila

terjadi ketidakcocokkan antara nilai dari model dan data alokasi DID dari (Kemenkeu, 2011), maka observasi tersebut dianggap tidak sesuai atau terjadi kesalahan/*error*. Selanjutnya kita dapat melihat apakah terjadi *exclusion error* yaitu daerah yang seharusnya (sesuai model) memenuhi kriteria sehingga berhak menerima DID, tetapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan DID (data dari Kemenkeu). Ataupun *inclusion error* yaitu apakah ada daerah yang seharusnya tidak memenuhi kriteria sehingga tidak berhak menerima DID, tetapi dalam kenyataannya justru mendapatkan DID.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

##### a. Variabel Opini BPK

Seiring dengan jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP terus meningkat, maka daerah yang mendapatkan Opini WDP dan TMP pun semakin menurun. Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini semua daerah berlomba untuk mendapatkan DID dengan berusaha meraih Opini WTP atau bahkan berusaha mempertahankan Opini WTP.



Gambar 2. Perkembangan Opini BPK Tahun 2010 – 2018

##### b. Variabel Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD

Perkembangan daerah yang memiliki ketepatan waktu dalam penetapan perda APBD setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria utama pemberian DID setiap tahunnya terus meningkat.



Gambar 3. Perkembangan Opini BPK Tahun 2010 – 2018



**c. Variabel Perubahan Opini BPK dari tahun sebelumnya**

Perkembangan daerah dengan perubahan opini BPK yang mampu menaikkan 3 level dan tetap mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya banyak daerah yang berjuang untuk memiliki pengelolaan administrasi keuangan daerah yang baik.



**Gambar 4. Perkembangan Perubahan Opini BPK dari tahun sebelumnya Tahun 2010 - 2018**

**d. Variabel Kenaikan PAD**

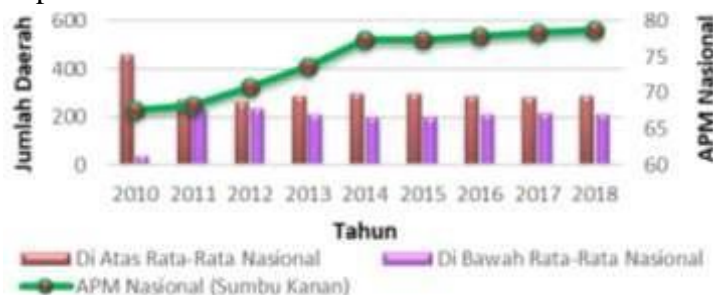
Setiap tahunnya daerah yang mampu memiliki kenaikan PAD di atas rata-rata nasional jumlahnya fluktuatif mengalami peningkatan maupun penurunan.



**Gambar 5. Perkembangan Kenaikan PAD Tahun 2010 – 2018**

**e. Variabel Angka Partisipasi Murni SMP**

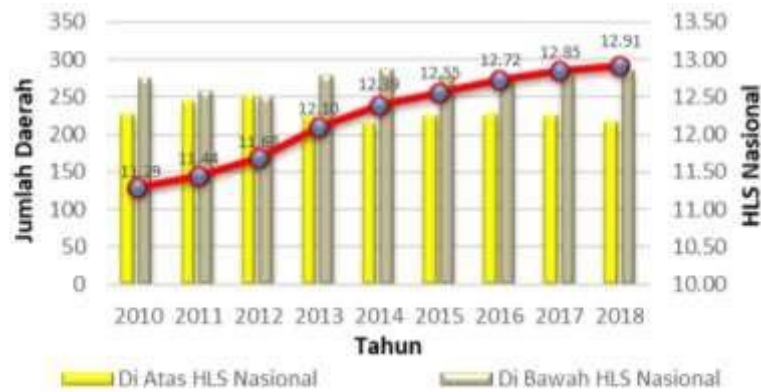
Di Indonesia masih banyak daerah yang memiliki angka persentase APM SMP di bawah rata-rata nasional, hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP.



**Gambar 6. Perkembangan APM SMP Tahun 2010 – 2018**

**f. Variabel Harapan Lama Sekolah**

Angka HLS beranjak meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018. Akan tetapi meningkatnya angka HLS nasional, tidak serta merta diikuti dengan kenaikan jumlah daerah yang memiliki angka HLS di atas angka HLS nasional.



**Gambar 7. Perkembangan HLS Tahun 2010 – 2018**

**g. Variabel Laju PDRB**

Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai dengan 2015, dengan laju PDB yang turun di bawah 5% pada tahun 2015. Sedangkan pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang perlahan naik.



**Gambar 8. Perkembangan Laju PDRB Tahun 2010 - 2018**

**h. Variabel Perubahan Tingkat Kemiskinan**

Angka kemiskinan terus mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tingkat kemiskinan setiap tahunnya, tidak serta merta diiringi dengan kenaikan jumlah daerah yang mampu menurunkan angka kemiskinannya di atas rata-rata perubahan tingkat kemiskinan nasional.



Gambar 9. Perkembangan Perubahan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 – 2018

**i. Variabel Persentase IDL**

Setiap tahunnya jumlah daerah yang memiliki persentase IDL di bawah IDL nasional masih lebih tinggi dari daerah yang berada di atas persentase IDL nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum memaksimalkan program imunisasi.



Gambar 10. Perkembangan Persentase IDL Tahun 2010 – 2018

**2. Analisis Hasil Regresi Logistik**

**1) Tahapan Uji Regresi Logistik**

- a. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)
- b. Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen.

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	2604.373 <sup>a</sup>	.547	.733

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,733 berarti variabilitas variabel dependen yang

dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 73,3%, sedangkan sisanya 26,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

c. Menguji Kelayakan Model Regresi

Dilakukan dengan uji *Hosmer* dan *Lemeshow's test* untuk melihat apakah data empiris sesuai dengan model dapat dikatakan fit.

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8.687	8	.369

Nilai *Chi Square* sebesar 8,687 dengan signifikansi (p) sebesar 0,369, menunjukkan model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05)

d. Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah ada korelasi kuat antara variabel dependen pada model. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel dependen. Indikasi tidak adanya multikolinieritas/korelasi yang kuat antar variabel dependen ditunjukkan dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 serta nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan mendekati 1.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.460	.024		-18.993	.000		
	opini_bpk	.112	.009	.201	11.959	.000	.363	2.757
	penetapan_perda	.164	.011	.155	14.289	.000	.863	1.159
	perubahan_opini	.155	.005	.468	28.416	.000	.375	2.665
	kenaikan_pad	.057	.012	.048	4.606	.000	.939	1.064
	apm_smp	.039	.011	.039	3.611	.000	.888	1.126
	hls	.006	.011	.006	.549	.583	.893	1.120
	laju_pdrb	.052	.010	.052	5.140	.000	.979	1.022
	perubahan_kemiskinan	.016	.010	.017	1.622	.105	.984	1.017
	idl	.042	.010	.042	4.045	.000	.950	1.052

a. Dependent Variable: did

e. Matriks Klasifikasi

Menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi peluang suatu daerah untuk mendapatkan DID.

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed	did	Predicted		Percentage Correct
		did		
		Daerah Tidak Menerima DID	Daerah Menerima DID	
Step 1	Daerah Tidak Menerima DID	2278	275	89.2
	Daerah Menerima DID	214	1742	89.1
Overall Percentage				89.2

a. The cutvalue is .500

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan prediksi atau ketepatan model dalam memprediksi kemungkinan suatu daerah menerima DID adalah sebesar 89,2%.

## 2) Hasil Uji Regresi Logistik

Uji regresi logistik dilakukan untuk menguji hipotesis dalam menentukan prediksi penerimaan DID suatu daerah. Berdasarkan hasil uji regresi logistik, maka persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut:

$$Y = -15,474 + 3,631 \text{ opini\_bpk} + 1,602 \text{ penetapan\_perda} + 0,183 \text{ perubahan\_opini} + 0,384 \text{ kenaikan\_pad} + 0,610 \text{ apm\_smp} + (-0,36) \text{ hls} + 0,377 \text{ laju\_pdrb} + 0,139 \text{ perubahan\_kemiskinan} + 0,458 \text{ idl} + \varepsilon$$

Hasil pengujian hipotesis 1 opini BPK menunjukkan koefisien regresi 3,631 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dari hasil ini berarti hipotesis 1 diterima, artinya opini BPK dengan level WTP mempunyai pengaruh positif yang signifikan dalam memprediksi penerimaan DID. Berdasarkan hasil pengolahan, didapatkan nilai *odds ratio* untuk variabel opini BPK sebesar  $\exp(3,631) = 37,767$ . Artinya, daerah dengan opini WTP atas LKPDnya memiliki kecenderungan sebesar 37,767 kali atas penerimaan DID dibandingkan daerah dengan opini TMP, TW dan WDP. Dengan kata lain, daerah yang memiliki opini WTP sangat besar kemungkinannya menerima DID.

Hasil pengujian hipotesis 2 ketepatan waktu penetapan Perda APBD, hipotesis 3 perubahan/kenaikan opini BPK, hipotesis 4 kenaikan PAD, hipotesis 5 APM SMP, hipotesis 7 laju PDRB, hipotesis 9 persentase IDL juga mempunyai pengaruh positif yang signifikan dalam memprediksi penerimaan DID.

Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis 6 HLS menghasilkan koefisien regresi (-0,36) dengan nilai signifikansi sebesar 0,735. Karena koefisien regresi bernilai negatif dengan nilai signifikansi  $0,735 > 0,05$  maka dari hasil ini berarti ditolak, HLS mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan dalam memprediksi penerimaan DID. Nilai *odds ratio* untuk variabel HLS sebesar  $\exp(-0,36) = 0,964$ . Artinya, daerah dengan angka HLS rendah memiliki kecenderungan sebesar 0,964 kali untuk menerima DID, dibandingkan daerah dengan angka HLS tinggi. Dengan kata lain, semakin rendah nilai harapan lama sekolah, maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut menerima DID.

Selanjutnya untuk hasil pengujian hipotesis 8 perubahan tingkat kemiskinan menghasilkan koefisien regresi 0,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,181. Koefisien regresi bernilai positif dengan signifikansi  $0,181 > 0,05$  maka dari hasil ini menunjukkan hipotesis 8 diterima, perubahan tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan dalam memprediksi penerimaan DID. Nilai *odds ratio* untuk variabel tingkat kemiskinan sebesar  $\exp(0,139) = 1,150$ . Artinya, daerah dengan perubahan tingkat kemiskinan yang tinggi memiliki kecenderungan sebesar 1,150 kali untuk menerima DID, dibandingkan daerah yang memiliki perubahan tingkat kemiskinan yang kecil. Yang artinya, semakin tinggi perubahan tingkat kemiskinan, maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut menerima DID.

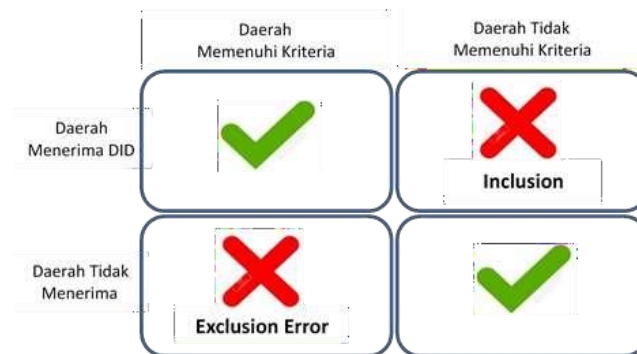
## 3. Pengecekan Kesesuaian Alokasi DID

Melalui model penelitian di atas, didapatkan nilai probabilitas pada masing-masing observasi, jika probabilitas prediksi model suatu daerah menghasilkan nilai probabilitas 0,5 ke atas maka daerah tersebut memenuhi kriteria penilaian, sehingga berhak untuk

menerima DID. Sebaliknya, jika probabilitas prediksi model suatu daerah menghasilkan nilai probabilitas di bawah 0,5 diasumsikan daerah tersebut tidak memenuhi kriteria penilaian sehingga tidak berhak untuk menerima DID.

Setelah mendapatkan nilai probabilitas pada masing-masing observasi, dilakukan pengelompokan kesesuaian. Aturan pengelompokan adalah jika hasil nilai probabilitas di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas menjadi 1 (memenuhi kriteria sehingga berhak menerima DID). Sedangkan bila nilai probabilitas di bawah 0,5 maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 (tidak memenuhi kriteria sehingga tidak berhak menerima DID).

Tahap selanjutnya yaitu pengecekan kesesuaian alokasi DID antara model statistik disandingkan dengan data status menerima/tidaknya suatu daerah DID dari data Kementerian Keuangan. Yaitu hasil nilai 0 1 dari model disandingkan dengan kode *dummy* 0 1 dari data Kemenkeu (0 = status daerah tidak mendapatkan DID, 1 = status daerah mendapatkan DID). Apabila terjadi ketidakcocokan antara nilai dari model dan data alokasi DID dari (Kemenkeu, 2011), maka observasi tersebut dianggap tidak sesuai atau terjadi kesalahan/*error*.



**Gambar 11. Skema kesalahan inklusi (*inclusion error*) dan kesalahan eksklusi (*exclusion error*) dalam penetapan daerah penerima DID**

Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaksesuaian alokasi dari tahun ke tahun. Terdapat sebanyak 487 observasi dari 4509 observasi yang dinyatakan tidak sesuai dengan alokasi dalam pemberian DID kepada pemerintah daerah. Dari 487 yang dinyatakan tidak sesuai dengan data alokasi DID dari (Kemenkeu, 2011), diketahui terjadi *exclusion error* yaitu daerah yang seharusnya (sesuai model) memenuhi kriteria sehingga berhak menerima DID, tetapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan DID (data dari Kemenkeu). Ataupun *inclusion error* yaitu apakah ada daerah yang seharusnya tidak memenuhi kriteria sehingga tidak berhak menerima DID, tetapi dalam kenyataannya justru mendapatkan DID. Perlu kita ketahui, bahwa bila suatu sistem mampu mengurangi kesalahan eksklusi (*exclusion error*) dan kesalahan inklusi (*inclusion error*) peserta/penerima manfaat kebijakan maka sistem tersebut dikatakan efektif.

Seperti yang disajikan pada tabel 2 dari total 1997 observasi yang memenuhi kriteria sesuai model penelitian, terdapat 264 observasi yang tidak menerima DID, 264 kesalahan pengalokasian tersebut adalah *exclusion error*. Selanjutnya dari total 2512 observasi yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan model penelitian, terdapat 223 observasi yang menerima DID, 223 kesalahan pengalokasian tersebut adalah *inclusion*

error. Rata-rata ketidaksesuaian pemberian alokasi DID pada tahun 2010 hingga 2018 adalah sebesar 10,81%.

**Tabel 2. Ketidaksesuaian Alokasi DID antara prediksi model dan data Kemenkeu**

No.	Tahun	Total Daerah Memenuhi Kriteria	Total Excl. Error	Total Daerah Tidak Memenuhi Kriteria	Total Incl. Error	Total Ketidaksesuaian Alokasi
1.	2010	33	12	468	45	57
2.	2011	60	13	441	27	40
3.	2012	104	24	397	16	40
4.	2013	141	28	360	18	46
5.	2014	235	20	266	47	67
6.	2015	290	32	211	48	80
7.	2016	347	49	154	5	54
8.	2017	373	62	128	12	74
9.	2018	414	24	87	5	29
<b>TOTAL</b>		<b>1997</b>	<b>264</b>	<b>2512</b>	<b>223</b>	<b>487</b>

Dari data penelitian, ketidaksesuaian sasaran dalam pemberian DID tertuang dalam gambar 12 di bawah, ditunjukkan bahwa jumlah ketidaksesuaian mengalami kenaikan sejak tahun 2011 hingga puncaknya di tahun 2015 ada 80 ketidaksesuaian alokasi penerima DID. Hal ini mungkin terjadi karena pada tahun 2015 terjadi perubahan kriteria penilaian yaitu dengan sistem pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah melalui pembobotan pada setiap indikator.

Sesuai gambar 12 pada tahun 2016 hingga 2018 terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan jumlah kesalahan alokasi daerah penerima, mungkin hal tersebut dikarenakan kriteria pemberian DID yang mengalami perubahan tahun demi tahunnya. Dari gambar di atas dapat dilihat pula bahwa sistem atau kriteria dalam pemberian DID mengalami perbaikan sehingga pada tahun 2018 karena jumlah ketidaksesuaian alokasi paling rendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebanyak 29 daerah. Hal ini terjadi mungkin karena telah dicabutnya PMK tentang pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah pada Desember 2017.



**Gambar 12. Perkembangan Ketidaksesuaian Penerima DID**

Sebagai contoh, *exclusion error* terjadi pada Kabupaten Semarang (2011), Provinsi Riau (2012), Provinsi Sumatera Barat (2013), Provinsi Bengkulu (2014), Provinsi Kepulauan Riau (2015), Provinsi Sulawesi Tengah (2016), Provinsi Maluku (2017) serta Provinsi Jawa

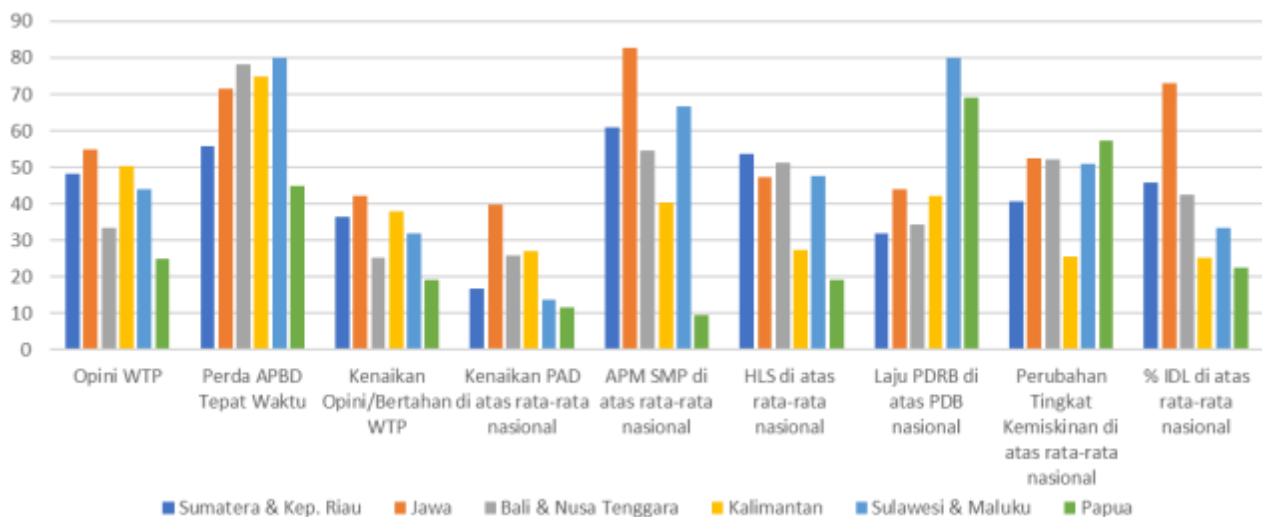
Barat (2018). Beberapa daerah tersebut menurut model statistik memiliki nilai probabilitas yang tinggi yaitu di atas 0,8 yang berarti masuk dalam kategori memenuhi kriteria penilaian atau dapat dikatakan berhak menerima DID. Akan tetapi pada kenyataannya, berdasarkan status data penerima DID dari (Kemenkeu, 2011), daerah tersebut tidak menerima alokasi DID.

Selain itu, contoh *inclusion error* terjadi pada Kabupaten Paser (2011), Kabupaten Mamuju (2012), Kabupaten Buton Utara (2013), Kabupaten Ende (2014), Kota Bengkulu (2015), Kabupaten Seruyan (2016), Kabupaten Natuna (2017), Kabupaten Rokan Hilir (2018). Beberapa daerah tersebut menurut model statistik memiliki nilai probabilitas yang rendah yaitu di bawah 0,4 yang berarti masuk dalam kategori tidak memenuhi kriteria penilaian atau dapat dikatakan tidak berhak menerima DID. Akan tetapi pada kenyataannya, berdasarkan status data penerima DID dari (Kemenkeu, 2011), daerah tersebut menerima alokasi DID.

## B. Pembahasan

Hasil opini BPK terhadap LKPD dengan level WTP serta kemampuan mempertahankan level WTP, paling banyak di raih oleh prov/kab/kota yang ada di wilayah pulau Jawa, sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2016 yaitu di Indonesia, daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan negara masih terpusat di Pulau Jawa.

PAD di dapat dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD cenderung tinggi pada daerah yang ditumbuhi oleh kegiatan sektor jasa, khususnya jasa pariwisata. Ternyata 7 dari 10 kota yang mendapatkan penghargaan atas Peringkat Tertinggi Indeks Pariwisata di Indonesia adalah kota yang ada di pulau Jawa. Fenomena ini juga terlihat pada grafik, bahwa pulau Jawa mendominasi kenaikan PAD di atas rata-rata jumlah kenaikan PAD nasional.



**Gambar 13. Tingkat kemampuan per wilayah di Indonesia dalam masing-masing variabel**

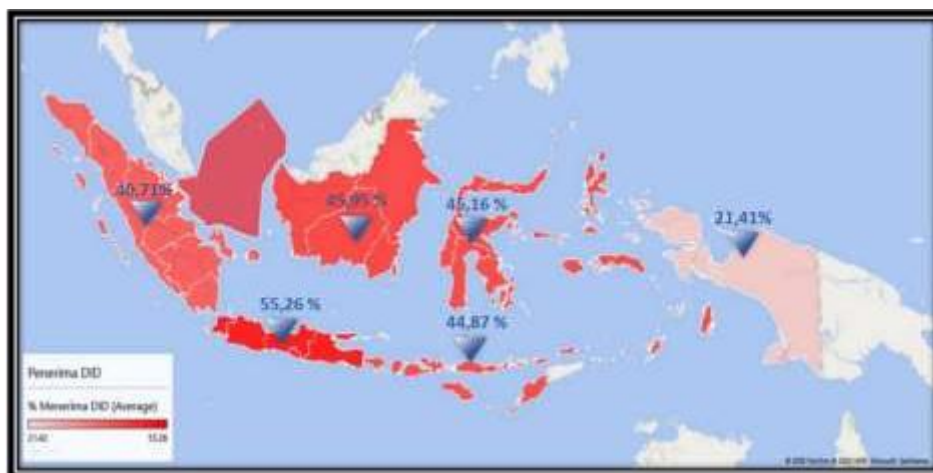
Sesuai dengan hasil penelitian, daerah dengan laju PDRB yang tinggi atau di atas laju PDB, berpeluang menerima DID. Dengan kata lain pemberian DID berpihak kepada daerah



yang sedang/sudah berkembang. Menurut BPS, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia adalah Pulau Sulawesi. Sulawesi memiliki laju pertumbuhan yang sangat tinggi karena saat ini Sulawesi telah menjadi pusat pertumbuhan baru di Kawasan Indonesia Timur seiring dengan berkembangnya industri yang mengolah sumber daya alam.

Data BPS (2019) 5 prov di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan terbesar adalah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo. Akan tetapi dari sisi penurunan % penduduk miskin, terdapat 6 Provinsi yang memiliki penurunan % penduduk miskin tertinggi (2019) yaitu Papua, NTB, Papua Barat, NTT, Bengkulu, Lampung. Ketika angka kemiskinan suatu prov itu tinggi, menurunkannya jauh lebih cepat dibandingkan provinsi yang persentasenya sudah di bawah 10%. Hal ini sesuai dengan grafik di atas yang menunjukkan bahwa wilayah Papua memiliki penurunan angka kemiskinan yang besar di atas rata-rata penurunan kemiskinan nasional.

Untuk ketiga variabel APM SMP, HLS, dan IDL, konsep variabel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kebijakan DID yang dikeluarkan pemerintah, yaitu mencapai angka nasional. Tetapi apabila daerah tersebut sudah memiliki APM SMP, HLS dan IDL yang tinggi, lalu masih diberikan DID, rasanya justru akan semakin membuat *gap* yang semakin besar dari sisi bidang pendidikan dan kesehatan. Sebaiknya yang dilihat disini adalah perubahan/delta variabel tersebut dari tahun sebelumnya, yaitu bagaimana kemampuan suatu daerah untuk memperbaiki beberapa variabel itu, sehingga dapat dilihat usaha suatu daerah apakah usahanya melebihi rata-rata nasional atau tidak.



**Gambar 14. Daerah Penerima DID berdasarkan Wilayah di Indonesia**

Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki sebaran provinsi/kabupaten/kota yang paling tinggi dalam menerima DID, yaitu sebesar 55,26%. Selanjutnya diikuti oleh pulau Kalimantan dengan 45,95% daerah di Pulau Kalimantan yang menerima DID. Serta wilayah yang memiliki persentase paling kecil dalam menerima DID adalah Papua dengan 21,42%.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diestimasi bahwa Kinerja Utama yang diwakili dengan variabel opini BPK dengan level WTP dan ketepatan waktu dalam penetapan perda APBD; Kinerja Pengelolaan Keuangan yang diwakili dengan variabel perubahan/kenaikan opini BPK dan kenaikan PAD; Kinerja Bidang Kesehatan yang diwakili oleh IDL memiliki pengaruh positif signifikan terhadap peluang suatu daerah dalam

menerima DID. Kinerja Bidang Pendidikan yang diwakili dengan variabel APM SMP memiliki pengaruh positif signifikan, akan tetapi variabel HLS memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Selanjutnya pada Kinerja Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan yang diwakili dengan laju PDRB menghasilkan pengaruh positif signifikan dan variabel perubahan tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan terhadap peluang suatu daerah dalam menerima DID.

Melalui model dalam penelitian ini, telah dilakukan uji coba untuk membuktikan apakah terjadi ketidaksesuaian alokasi dalam pemberian DID selama ini. Dan hasilnya adalah terjadi ketidaksesuaian alokasi dalam pemberian DID dari kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2018. Dimana rata-rata ketidaksesuaian pemberian alokasi DID pada tahun 2010 hingga 2018 adalah sebesar 10,81%. Jumlahnya signifikan menurun pada tahun 2018 yaitu terjadi 29 kesalahan alokasi pemberian DID. Temuan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya variabel bebas dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi nilai probabilitas suatu daerah dalam menerima DID; adanya lag 2 tahun dalam penentuan kriteria pemberian DID yang mungkin dapat menyebabkan kesalahan terjadi karena dalam waktu 2 tahun itu mungkin ada kemajuan/perubahan daerah tersebut; mungkin ada potensi dari kekuatan politik dalam penentuan pemerintah pusat menetapkan pemberian DID kepada daerah. Misal suatu daerah tidak memenuhi kriteria dalam penerimaan DID tetapi karena ditunggangi oleh kekuatan politik, daerah tersebut menerima DID.

### Bibliografi

- Adi, P. H. (2016). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, 23–26.
- Andriyani, A. & B. S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 101–115.
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569–586.
- Cassio, W. F. (2013). *Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits*. New York: McGraw-Hill.
- Chaniago, P., & Rusdi, M. (n.d.). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Bengkulu*. Universitas Bengkulu.
- Handayani, N. S., Bendesa, I., & Yuliarmi, N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449–3474.
- Harvey, R., & Gayer, T. (2013). *Public finance*. McGraw-Hill Higher Education.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Indrarti, N. M. O. (2011). Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal. Universitas Riau*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kemenkeu. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah*. Kementerian Keuangan.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). Akuntansi sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Ramadhani, F. S. (2019). Analisis Deskriptif Cross-Sectional Kondisi Kesehatan Dan Tingkat Imunisasi Wilayah Papua Barat. *Visikes: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2).
- Ranupandojo, H., & Husnan, S. (1984). Manajemen Personalialia, Edisi III. *Yogyakarta: BPFE*.

- Ruzikna, R., & Fitriadi, R. (2015). *Pengaruh Pemberian Insentif terhadap Kinerja Karyawan Distributor Baterai Yuasa (Kasus PT. Riau Indotama Abadi Pekanbaru)*. Riau University.
- Virgasari, A. (2009). Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi. Universitas Brawijaya Malang*.